SUMBER SOSIOLOGIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

NAZRATUL HASANAH

Inesnazratul15@gmail.com

20220113

STIE AKBP KBP PADANG

A. PENDAHULUAN

Setiap negara tentunya memiliki ideologi dalam sistem pemerintahannya, adapun ideologi negara itu termasuk dalam golongan pengetahuan sosial, yang tepatnya dapat digolongkan ke dalam ilmu politik sebagai anak cabangnya. Di dunia ini ada beberapa ideologi yang menjadi dasar pandangan hidup suatu negara, diantaranya ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan fasisme. Beberapa negara menggunakan ideologi-ideologi tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menggunakan “Pancasila” sebagai ideologi negara yang menjadi representasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tidak terbentuk secara otodidak dan tidak hanya diciptakan oleh golongan ataupun pribadi tertentu sebagaimana ideologi bangsa lain, namun Pancasila terbentuk melalui proses yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Permasalahan tentang Ideologi Pancasila bukan hanya permasalahan mengenai kefilosofan yang bersifat cita-cita dan normatif, namun juga bersifat praktis karena menyangkut operasionalisasi dan strategi. Hal tersebut karena ideologi Pancasila erat kaitannya dengan landasan suatu ajaran mengenai makna hidup yang kemudian diaktualisasi dengan perilaku-perilaku yang luhur berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila bukan digunakan sebagai tuntunan yang bersifat tekstual agar warga negara mempunyai agama, berbuat adil, bersatu, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akan tetapi, ideologi Pancasila merupakan nurani bangsa Indonesia yang kemudian menuntut warga negara berbudi luhur, sehingga tercipta bangsa Indonesia bangsa yang beradab dan bermartabat.

B. PEMBAHASAN

a. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses yang panjang, dimulai dengan masa kerajaan (Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan bercorak Islam) sampai dengan masa penjajahan oleh bangsa lain. Ratusan tahun telah dijalani bangsa Indonesia

untuk menemukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat serta memiliki suatu prinsip filsafat yang tersimpul dalam sistem filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain, yang kemudian oleh pendiri bangsa diberi nama Pancasila.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan Kausa Materialis (asal bahan) Pancasila.

Rumusan pancasila harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Hal tersebut termaktub dalam sila-sila nya, diantaranya ;

Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada diskriminasi dan intimidasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. (Asshidqie, Jimly, 2005) Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila secara prinsip menegaskan masyarakat Indonesia hidup dalam rasa kekeluargaan. Bahwa, akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat chauvinistis.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.

Permusyawaratan merupakan cara khas dari kepribadian bangsa Indonesia dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak bersama, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia,

baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

b. Pancasila sebagai ideologi terbuka

1) Ideologi

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein*, yang berarti melihat, atau *Idea* yang berarti rawut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan *logia* yang berarti ajaran. Dengan demikian Ideologi ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran (*science des ideas*). Menurut Levi Martin ideologi berarti *beliefs, attitudes, and values* (keyakinan, perilaku, dan nilai).

Dalam buku “Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” yang ditulis oleh Prof.Drs. C. S. T Kansil, S.H menjelaskan definisi ideologi sebagai berikut;

- a) Ide : rancangan yang tersusun dalam pikiran; cita-cita; gagasan
- b) Ideologi
 - Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup,
 - Cara berfikir seseorang atau suatu golongan
- c) Ideologi politik : sistem kepercayaan yang membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan (oleh negara=ideologi negara)

2) Karakteristik ideologi

1. *Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis.* Situasi krisis yaitu situasi dimana cara bertindak & cara berfikir yang sebelumnya dianggap umum dan wajar, namun sekarang tidak dapat diterima lagi. Kondisi yang serba kalut (menghebatnya ketegangan sosial) ini yang mendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
2. *Ideologi merupakan pemikiran yang sistematis, meskipun cenderung kaku dan tertutup.* Ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima masyarakat secara rasional. Ideologi sering menampilkan sifat *self contained* dan *self sufficient* yang berarti ideologi merupakan suatu pola pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan dan pembaharuan. Sehingga Ideologi cenderung menjadi reduksionis yaitu mengetengahkan penjelasan & rekomendasi yang sederhana, umum, dan lebih mudah dipahami.

3. *Ideologi memiliki ruang lingkup jangkauan yang sangat luas*, . Ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun masyarakatnya. Sehingga ideologi dapat menjadi parameter dalam mengukur keberhasilan suatu negara
4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan Ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya.

3) Fungsi ideologi

Sebagai dasar pemikiran, ideologi memiliki beberapa fungsi yang dijabarkan sebagai berikut;

- a. Struktur kognitif. Struktur kognitif merupakan segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami, merasakan, dan menafsirkan segala kejadian yang terjadi di sekitarnya (alam semesta). Struktur kognitif menjadi pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan dalam sekelompok masyarakat atau bangsa. Pemahaman ideologi oleh suatu bangsa dapat mempengaruhi kebijakan yang ada di negaranya, baik kebijakan politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan.
- b. Orientasi dasar. Ideologi memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman. Ideologi digunakan sebagai pedoman akan tindakan dalam batasan-batasan norma.
- d. Kekuatan untuk mencapai tujuan. Ideologi berfungsi untuk mendorong dan memberikan semangat untuk mencapai tujuan negara. Tanpa adanya pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, suatu bangsa tidak akan mampu mencapai tujuan dan cita-citanya.
- e. Jalan untuk menentukan identitas diri. Ideologi dapat menentukan identitas bangsa, yang artinya ideologi dapat dijadikan jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa lain
- f. Sumber edukasi untuk masyarakat. Ideologi berfungsi sebagai sumber pendidikan masyarakat untuk memahami, menghayati, dan mengimplementasikan tindakan sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

4) Dimensi ideologi

- **Realitas**

Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

- **Idealitas**

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.

- **Fleksibilitas**

mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

5) Ideologi di Dunia

Di dunia ini terdapat beberapa ideologi besar dengan karakteristik tertentu, ideologi tersebut diantaranya;

- a) Ideologi agama. Negara yang menganut ideologi ini menggunakan agama sebagai landasan dasar pemikiran, landasan tujuan negara, serta landasan berperilaku.
- b) Ideologi liberalisme. suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c) Ideologi marxisme-leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi, kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
- d) Ideologi sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state.
- e) Ideologi komunisme, paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi (modal, tanah, tenaga kerja) yang memiliki tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama.

- f) Ideologi fasisme, ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi.
- g) Ideologi leninisme, Paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Paham ini sebenarnya sama dengan marxisme
- h) Ideologi pancasila, paham yang bersumber dari nilai-nilai yang digali berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Lima sila yang tercantum dalam Pancasila merupakan dasar pemikiran bangsa Indonesia.

6) Ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka

a) Asal muasal ideologi Pancasila

Dikemukakan oleh Presiden Soeharto Pada tanggal 10 November 1986 dalam acara pembukaan dan penataran calon manggala BP-7 Pusat yang kemudian diselenggarakan ulang pada tanggal 16 Agustus 1989 dalam pidato kenegaraannya, sebagai berikut;

“Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya kemukakan bahwa pancasila adalah ideologi terbuka, maka kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegas dan kreatif untuk mengamalkan pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis, yaitu ; nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam kurun waktu.

b) Ideologi terbuka berdasarkan penjelasan UUD 1945

Sumber semangat yang mendasari Pancasila sebagai ideologi terbuka sebenarnya telah tercantum dalam penjelasan umum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai berikut;

- “.... terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar itu tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah dengan cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya”
- “yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara adalah semangat, semangat penyelenggaraan negara, semangat para pemimpin pemerintahan”

7) Arti ideologi pancasila

Pengertian ideologi terbuka ialah;

- a) pandangan hidup bangsa yang mempunyai nilai dasar yang tetap sepanjang zaman, yaitu Pancasila.
- b) Pandangan hidup bangsa yang mampu berkembang secara dinamis (nilai instrumental) yang dapat berubah misalnya UUD 1945 dan GBHN.
- c) Nilai praktis berupa pelaksanaan nyata dari nilai instrumental seperti pemilihan umum dan demokrasi.

Unsur Ideologi terbuka:

- a. Nilai dasar yang bersifat tetap, yakni tentang cita-cita, tujuan, serta lembaga-lembaga penyelenggara negara umum, termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan wewenangnya yang bersifat tetap sepanjang zaman.
- b. Nilai instrumental yang dinamis, yaitu arahan, kebijaksanaan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya (departemen, Ditjen, Gubernur, dll) yang dapat disesuaikan dengan kehendak zaman.

Hakikat Ideologi Pancasila

- Pancasila sebagai nilai dasar ideologi negara tidak boleh berubah
- Yang dapat berubah adalah nilai instrumental diantaranya voting (musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak), asas pancasila satu-satunya asas, sistem penataran P4, diskusi Paripurna, dan permainan simulasi

c. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

a) Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

• Pancasila sebagai ideologi negara masa pemerintahan Pres. Soekarno

Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960-1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) sebagai landasan politik bangsa Indonesia.

• Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Pres. Soeharto

Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang

pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu.

- **Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Pres. Habibie**

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

- **Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Pres. Gusdur**

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

- **Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Pres. Megawati**

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

- **Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)**

Pemerintahan SBY dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

b) Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa** dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
2. **Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab** dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. **Sila Persatuan Indonesia** yang dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

c) Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa** diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.
2. **Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab** diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
3. **Sila Persatuan Indonesia** diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
4. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
5. **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

d. Urgensi Pancasila sebagai ideologi Negara

Seiring dengan arus globalisasi yang sangat cepat, perubahan struktur sosial suatu negara juga berubah. Globalisasi menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain untuk mempertahankan kebudayaan dan tatanan sosialnya. Globalisasi merupakan era dimana masyarakat di dunia saling terbuka, tidak ada sekat yang membatasi. Hal tersebut kemudian menciptakan kebudayaan global yang terbentuk dari beberapa beragam kepentingan yang mendekatkan perbedaan kebudayaan di dunia.

Disamping globalisasi, terdapat faktor internal yang menjadi alasan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yaitu menjaga eksistensi nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada sejak dulu.

e. Implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan

1. Segenap rakyat Indonesia dapat mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara. (silal)

2. Segenap rakyat Indonesia saling bahu-membahu menghormati hak-hak sesama demi terciptanya ketertiban dan keamanan terhadap lingkungan. (sila ke 2)
3. Masyarakat Indonesia bersama-sama, bersinergi, mengesampingkan ego pribadi untuk memajukan Indonesia demi terciptanya tujuan negara bangsa Indonesia (sila ke-3)

f. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi

- a) Masuknya paham radikal. Paham radikal tentunya bertolak belakang dengan ideologi pancasila. Radikalisme yang telah mengakut pada diri seseorang ataupun kelompok akan berdampak pada inkondusifnya negara Indonesia
- b) Mulai mudarnya budaya gotong-royong bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia cenderung mulai individualis
- c) Kapitalisme mulai masuk dalam sistem perekonomian Indonesia.
- d) Perilaku Konsumtif dan hedonisme
- e) Intoleransi agama, misalnya, kasus pembakaran gereja.
- f) Black campaign dan money politik saat pemilu

C. PENUTUP

Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang ideal bagi bangsa Indonesia, karena ideologi Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi yang sudah ada di dunia. Ideologi pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Ideologi Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Urgensi dibutuhkan Pancasila sebagai ideologi negara adaah tantangan globalisasi. Globalisasi dapat merubah tatanan sosial masyarakat Indonesia, dalam hal tersebut, Pancasila dapat dijadikan sebagai filter kebudayaan luar yang masuk. Eksistensi Pancasila sebagai ideologi tidak terlepas dari kepribadian, perilaku, dan pola pikir masyarakat Indonesia. Kepribadian dan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan lima sila dalam Pancasila dapat diimplementasikan dengan memeluk agama tertentu, selektif memilih kebudayaan luar, saling membantu antar sesama, bersatu untuk mencapai tujuan, tidak berbuat sewenang-wenangnya, dan bentuk lainnya yang mampu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada semenjak dulu.

DAFTAR PUSTAKA

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference

(Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang•Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang- Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.